

Islamisasi Penulisan Sejarah: Survey Gagasan Hamka dan Ahmad Mansur Suryanegara

Tiar Anwar Bachtiar

Pengajar di STAI Persatuan Islam Garut dan Universitas Padjadjaran Bandung

tiaranwar@yahoo.com

Abstract

From the early time of Indonesian history writing after the Independent of Indonesia for defining "what the Indonesian nation is", many Moslem leaders and activists gave complain about these writings. The point is that the writings of Indonesian history had already existed at the time tend more to hinduisme and give less role of Islam and Moslems in Indonesian history at the same time. Two of Molem historical thinkers who complained about this problem are Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) and Ahmad Mansur Suryanegara (AMS). Teh aim of this paper is to explore their ideas about Islamization of Indonesian historical writing. Based on surveying of their books about Indonesian history, it's proofed that both of HAMKA who's not trained especially in history and AMS who his long career was lecturer in department of history at Padjadjaran University Bandung tried to propose the concept of islamization of Indonesian history by enlarge spaces bigger than now for Islamic figures in Indonesian history. However, not found from both of them the proper concepts or thoughts about methodological aprouch to reach their objectives. AMS who trained in modern (western) methodology of history seem not critized that methodology, even came from West.

Keywords: *Islamization, Islamization of Historical Writing, HAMKA, Ahmad Mansur Suryanegara, Islamic Role in Indonesian history.*

Abstrak

Semenjak ada usaha untuk menuliskan sejarah Indonesia setelah Indonesia merdeka sebagai upaya untuk mendefinisikan bentuk "Indonesia" sebagai sebagai sebuah bangsa dan komunitas politik, dari kalangan aktivis dan pemimpin Islam banyak yang mengajukan keberatan. Pada umumnya mereka mengajukan keberatan bahwa Indonesia yang digambarkan terlalu bernuansa Hindu dan memberikan ruang yang sangat sempit bagi sejarah umat Islam. Di antara tokoh yang sangat vokal menyuarakan keberatan ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dan Ahmad Mansur Suryanegara (AMS). Tulisan ini bertujuan mengungkap bagaimana gagasan keduanya tentang Islamisasi penulisan sejarah Indonesia yang dirasakan keduanya kurang "Islam". Berdasarkan survey terhadap karya-karya sejarah Indonesia yang ditulis oleh keduanya, maka dapat ditemukan bahwa baik HAMKA yang tidak secara khusus dilatih sebagai sejarawan dan AMS yang merupakan dosen sejarah di Universitas Padjadjaran sama-sama berusaha menawarkan peng-Islam-an penulisan sejarah Indonesia dengan memberikan ruang lebih luas untuk diangkatnya peran umat Islam dalam sejarah Indonesia semenjak kedatangan Islam yang

diperkirakan HAMKA sudah ada sejak abad ke-7 M. Hanya saja, keduanya tidak ditemukan merumuskan metodologi yang ajeg dalam melakukannya. Kelihatannya AMS yang dididik dalam metodologi Barat dalam penulisan sejarah tidak terlampau mempermasalahkan perihal metodologi sejarah walaupun datang dari Barat.

Kata Kunci: Islamisasi, Islamisasi Penulisan Sejarah, HAMKA, Ahmad Mansur Suryanegara, Peran Islam dalam Sejarah Indonesia.

PENDAHULUAN

Sejarah sebagai wilayah politik “Indonesia” baru dialami oleh bangsa ini semenjak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kawasan ini sebelumnya dikuasai Belanda secara bertahap sejak kedatangan VOC (1602) hingga penguasaan Jepang (1942-1945). Bila ditarik lagi ke belakang kawasan ini secara politik terdiri atas kerajaan-kerajaan berjumlah ratusan yang terbentang dari Aceh hingga Papua. Artinya kawasan ini sebelumnya bukan merupakan satu kesatuan politik. Oleh sebab itu, salah satu agenda penting bagi penguasa Indonesia baru sejak tahun 1945 (Proklamasi RI) dan 1950 (NKRI) adalah masalah integrasi bangsa ini agar merasa sebagai satu kesatuan dalam bingkai “Republik Indonesia”, walaupun secara geografis, budaya, dan pergaulan sosial berbeda-beda. Oleh sebab itu, salah satu yang dijadikan platform bersama pendirian negara yang disebut Pancasila, salah satu silanya adalah “Persatuan Indonesia”.

Sebetulnya integrasi masyarakat di berbagai kawasan Indonesia ini menjadi “bangsa Indonesia” diuntungkan dengan dua kesamaan penting mayoritas penduduk kawasan ini, yaitu agama (Islam) dan bahasa komunikasi (bahasa Melayu). Kedua hal ini sudah sangat lama sudah dipraktikkan oleh penduduk kawasan ini yang mayoritas menganut agama Islam dan sehari-hari, walaupun secara lokal berbicara menggunakan ratusan bahasa yang berbeda-beda, mereka berkomunikasi dengan masyarakat lain menggunakan bahasa Melayu. Kedua faktor ini karena telah dipraktikkan selama berabad-abad menjadi faktor yang sangat memudahkan untuk mengintegrasikan bangsa ini. Tidak semua negara berwarga manjemuk secara kultural memiliki keunggulan seperti Indonesia ini.

Untuk memahami tentang keharusan integrasi bangsa ini kepada warga negara baru ini tentu ada instrumen-instrumen kongkrit yang digunakan seperti pembinaan bahasa Indonesia serta penulisan dan pengajaran sejarah. Masalah bahasa bukan yang akan dibahas dalam tulisan singkat ini. Tulisan ini akan menyoro masalah penulisan sejarah Indonesia. Masalah visi penulisan sejarah Indonesia sejak Seminar Sejarah Nasional 1957 yang memang ditujukan salah satunya untuk membina persatuan Indonesia hanya mempertimbangkan faktor-faktor sekuler dari sejarah seperti kesatuan politik dan ekonomi. Kalaupun berbicara budaya diarahkan untuk sebisa-bisanya menghindarkan faktor agama. Sejak awal setelah seminar ini Hamka banyak mengkritisi pandangan yang mengabaikan agama, terutama Islam, dalam penulisan sejarah Indonesia. Padahal, hakikatnya di antara yang mempermudah persatuan Indonesia ini adalah karena mayoritas penduduk negeri ini menganut agama yang sama, yaitu Islam.

Kondisi ini melahirkan tantangan tersendiri dalam penulisan sejarah Indonesia bagi umat Islam. Ada tantangan yang bersifat eksternal di luar umat Islam, ada pula yang datang dari kelemahan umat Islam sendiri. Bila ditelisik, secara umum, tantangan *pertama* yang dihadapi umat Islam dalam konteks historiografi di Indonesia datang dari penulisan sejarah Indonesia itu sendiri. Terdapat kecenderungan dalam penulisan sejarah resmi Indonesia selepas kemerdekaan untuk menyingkirkan peran signifikan umat mayoritas di negeri ini. Dalam kajian Michael Wood, semenjak Indonesia merdeka, terutama ketika Suharto berkuasa ada usaha sangat serius untuk menerbitkan “versi resmi” sejarah Indonesia. Versi resmi sejarah Indonesia ini sangat diinspirasi mula-mula oleh penulis sejarah populer Muhammad Yamin dalam bukunya *Gadjah Mada: Pahlawan Persatuan Nusantara dan 6000 Tahun Sang Saka Merah Putih*. Kedua buku ini telah menginspirasi, baik Sukarno maupun Suharto, untuk mematenkan suatu cerita resmi Indonesia yang dalam pandangan Yamin Indonesia merupakan produk akhir dari suatu proses historis yang panjang; paling tidak sejak Sriwijaya dan Majapahit. (Michael Wood. *Sejarah Resmi Indonesia versi Orde Baru dan Para Penentangannya*. Ombak Yogyakarta, 2013; hal. 27-29).

Tulisan Yamin di atas merupakan wujud historiografi yang berasal dari gagasannya tentang “Filsafat Sejarah Nasional”. Merujuk kepada teori Ibnu Khaldun tentang kekuatan primordial (*ashobiyah*) yang ada dalam setiap bangsa, maka menurutnya suatu filsafat sejarah nasional Indonesia harus terdiri atas empat sila, yaitu: kebenaran, sejarah Indonesia, sintesis, dan nasionalisme Indonesia. Keempat hal di atas ia sebut sebagai “*catursila khalduniyyah*” yang harus dirujuk kepada pemikiran asli Indonesia, di antaranya Nagarakertagama. Yamin percaya bahwa dengan merujuk pada sumber inilah nasionalisme dan jatidiri keindonesiaan itu akan dapat ditemukan aslinya, tidak terpengaruh yang lain. (William H. Federich dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, LP3ES Jakarta, 2005; hal. 48-55)

Gagasan-gagasan Yamin ini yang bila ditelusuri sesungguhnya merupakan warisan kolonial yang menemukan naskah Nagarakertagama dan mengajarkannya kepada pelajar-pelajar Indonesia seperti Yamin. Hampir tanpa sikap kritis Yamin mengambilmnya sebagai kebenaran tentang informasi masa lalu sejarah Indonesia hingga ia berani menyimpulkan bahwa Majapahit dengan segala anasirnya merupakan tonggak awal lahirnya “bangsa Indonesia”. Wacana ini mungkin tidak akan menjadi tantangan serius bagi umat Islam di Indonesia bila hanya muncul sebagai wacana, karena banyak konsepsi lain yang tidak sependangan dengan Yamin. Masalahnya, gagasan Yamin inilah yang diterima sebagai dasar konsepsi resmi penulisan sejarah Indonesia yang kemudian diajarkan di sekolah-sekolah.

Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini seolah diabaikan begitu saja keberadaannya. Seolah-olah keberadaan umat Islam dalam sejarah Indonesia tidak merupakan faktor penting dalam membentuk bangsa ini. Oleh sebab itu, faktor “Islam” sebagai pembentuk identitas bangsa Indonesia dianggap

tidak terlalu signifikan, untuk tidak menyebut dinihilkan sama sekali. Oleh sebab itu, penggalian resmi yang dibiayai negara terhadap aspek-aspek pengaruh Islam bagi bangsa ini tidak diberi perhatian utama dibandingkan dengan penggalian aspek-aspek Hindu di berbagai kawasan sebagai konsekwensi dari penerimaan gagasan Yamin di atas.

Tantangan *kedua* yang dihadapi umat Islam dalam penulisan sejarahnya adalah menguatnya arus sekularisasi dalam kajian di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam semua disiplin ilmu, termasuk di dalamnya dalam pengkajian sejarah. Sejak awal penulisan historiografi yang bersifat akademik yang dikerjakan para sarjana yang terlatih khusus untuk menulis sejarah, pandangan-pandangan sekuler sangat kuat. Hal ini ditandai dengan minusnya pendekatan-pendekatan agama dalam kajian sejarah. Walaupun ada sejarah agama, namun cara pandang dan pembahasannya berparadigma sekuler. Tidak mengherankan bila kemudian arus penulisan sejarah Indonesia penuh dengan narasi-narasi sekuler.

Bagi umat Islam tentu saja ini menjadi semakin menyulitkan untuk menunjukkan faktor dominan agama, terutama Islam, dalam arus sejarah Indonesia. Sebagai agama mayoritas, peluang Islam berpengaruh kuat dalam arus sejarah bangsa ini sangat terbuka. Akan tetapi cara pandang yang sekuler terhadap sejarah menyebabkan setiap peristiwa sejarah hanya dianggap wajar bila ditafsirkan secara sekuler, yaitu tafsir yang semata-mata didorong dengan kekuatan duniawi belaka. Hal ini akan semakin terlihat manakala kita mengkaji hasil-hasil riset sejarah para sarjana Indonesia selama empat sampai lima puluh tahun belakangan ini.

Tantangan *ketiga* adalah kelemahan internal umat Islam di Indonesia sendiri dalam memberikan perhatian pada penulisan sejarah negerinya. Umat Islam di Indonesia boleh dikatakan masih sangat minim kesadaran akan pentingnya sejarah sebagai salah satu faktor dalam membangun kekuatan umat Islam. Umat Islam cenderung sangat mudah, tanpa daya kritis memadai, menerima berbagai mitos tentang masa lalu yang mereka alami. Misalnya mitos tentang orang-orang hebat yang dikeramatkan, mitos walisongo, mitos kesaktian, mitos kekuatan gaib, dan sebagainya. Bahkan kini "kritik" atas sejarah pun dasarnya mitos seperti mitos kedatangan sahabat-sahabat Nabi ke kawasan Nusantara, mitos khilafah, mitos Turki Usmani, mitos NII dan sebagainya.

Umat Islam mudah sekali diserang mitologi disebabkan lemahnya kesadaran terhadap sejarah. Umat Islam seringkali abai bahwa sejarah tidak seperti mitos yang mudah dibuat dan direproduksi tanpa melibatkan pembuktian-pembuktian ilmiah. Walaupun seringkali ada gunanya, yaitu di antaranya untuk mengobati kegundahan atas satu kondisi, namun dalam jangka panjang mitos-mitos justru menyebabkan umat Islam menjadi seperti hidup di alam mimpi dan khayal. Umat Islam menjadi tidak terlalu memberi perhatian pada usaha-usaha penyelidikan ilmiah yang merupakan dasar dari tegaknya

suatu peradaban. Inilah yang menyebabkan umat Islam Indonesia belum memiliki tradisi penulisan sejarah yang baik dan kritis.

Situasi-situasi inilah yang dihadapi para penulis sejarah Muslim di Indonesia selepas Indonesia merdeka tahun 1945. Di samping harus menghadapi kontestasi penulisan sejarah dengan para penulis sekuler yang cenderung mengarahkan gerak sejarah Indonesia secara sekuler pula, para sejarawan Muslim di Indonesia juga menghadapi tantangan minat yang rendah dari umat Islam Indonesia terhadap sejarah. Keduanya harus dihadapi secara bersamaan untuk semakin mengintegrasikan umat Islam ke dalam negara baru ini dan sekaligus membina peradaban Islam yang kokoh di negeri ini.

Tulisan ini akan memokuskan kajian pada usaha-usaha para sejarawan Muslim Indonesia dalam menghadapi tantangan pertama dan kedua di atas, yaitu tantangan penulisan sejarah yang sekuler. Di antara tokoh-tokoh pemikir penting dalam lapangan ini terpilih tiga orang nama, yaitu: Hamka dan Ahmad Mansur Suryanegara. Tentu bukan ini orang ini yang ikut memikirkan penulisan sejarah Indonesia. Ada beberapa tokoh lain yang terkenal seperti Kuntowijoyo, Taufik Abdullah, Azyumardi Azra, Uka Tjandrasasmita, dan lainnya. Hanya saja, ketiga nama di atas layak untuk diangkat karena pemikiran-pemikiran mereka yang berkarakter khas, yaitu pemihakan terhadap Islam dalam sejarah Indonesia tanpa tedeng aling-alang, cenderung tegas, dan seringkali dituduh fundamentalis. Boleh dikatakan ketiga penulis ini merupakan penulis-penulis populer yang sama-sama mengusung gagasan "Islamisasi penulisan sejarah Indonesia".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gagasan Hamka

Minat Hamka terhadap sejarah tidak tumbuh di bangku perkuliahan. Ia merupakan otodidak dalam bidang ini. Beruntung bahwa disiplin ilmu sejarah masih sangat terbuka, bahkan bagi para otodidak sekalipun. Minatnya tumbuh entah dari mana, namun yang pasti semenjak sebelum Kemerdekaan dalam beberapa majalah yang dipimpinnya, terutama *Panji Masyarakat*, Hamka secara khusus banyak menulis tentang tema-tema sejarah Indonesia. Kumpulan tulisannya tentang berbagai fragmen sejarah lama Indonesia kemudian dihimpun dalam bukunya *Dari Perbendaharaan Lama*. Melalui esai-esai sejarah dalam majalahnya inilah Hamka kemudian dikenal umum sebagai pengkaji masalah-masalah sejarah Islam, terutama di Indonesia.

Keseriusan Hamka dalam menekuni sejarah Islam, terutama sejarah Islam Indonesia, semakin ditunjukkannya dengan menulis buku *Sejarah Umat Islam* (SUI) sebanyak lima jilid. Jilid pertama hingga keempat berisi sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw hingga sebagian periode Usmani. Sementara jilid kelima khusus mengupas sejarah Islam di Indonesia hingga abad ke-17. Ia juga menulis buku biografi ayahnya, Haji Rasul, dengan judul *Ayahku* yang merupakan satu-satunya karya sejarah mendalam yang dibuat Hamka berdasarkan sumber-sumber langsung yang dialaminya; sementara tulisan-tulisan sejarah lainnya lebih

bersifat esais dan ensiklopedis, bukan suatu pendalaman atas peristiwa sejarah tertentu. Tulisan lainnya mengenai sejarah adalah bantahan Hamka atas buku T.O. Parlindungan *Tuanku Rao*, yang ia beri judul *Fakta dan Khayal Tuanku Rao*. Buku ini jelas bersifat polemis sebagai sanggahan atas beberapa klaim Parlindungan mengenai beberapa aspek kesejarahan Islam di Sumatera. Hamka juga menulis biografi tokoh yang cukup berpengaruh di Indonesia, walaupun tidak secara langsung, yaitu Sayyid Jamaludin Al-Afghani. Buku ini ditulisnya berkait kontroversi mengenai sosok Jamaludin Al-Afghani ini. Ia juga menulis buku sejarah kebatinan di Indonesia dengan judul *Perkembangan Kebatinan di Indonesia*. Berikutnya sejarah lain yang ditulisnya adalah *Sejarah dan Perkembangan Ajaran Tasawuf*.

Menilik kepada karya-karyanya, sesungguhnya hampir tidak ada buku-buku sejarah yang ditulis Hamka yang bersifat mendalam menitik kepada satu persoalan sejarah mikro, kecuali buku *Ayahku*¹ dan prasarannya dalam Seminar Masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan Departemen Agama tahun 1963 di Medan. Hanya saja, buku *Ayahku* ini ditulis dengan gaya bercerita seperti seorang anak menceritakan ayahnya walaupun ada informasi mengenai perkembangan Islam di Sumatera. Walaupun penuh dengan fakta-fakta primer perihal ayahnya, namun dari sudut kajian sejarah, tidak terlihat suatu metodologi khusus yang dilakukannya untuk menuliskan bukunya ini. Maksudnya, tidak ada kerja analitis dari segi sejarah untuk menyusun klaim-klaim dalam tulisannya tersebut. Dalam hal ini Hamka benar-benar mengandalkan pikiran *common sense*-nya untuk menuliskan suatu kisah sejarah. Apalagi karya-karyanya yang lain yang pada umumnya hanya mengandalkan sumber-sumber sekunder sehingga yang dilakukan Hamka tidak lebih hanya "menulis ulang" apa yang sudah ditulis orang sebelumnya. Hampir tidak ada informasi baru yang digagas dan digalinya sendiri. Dalam hal ini, Hamka lebih tepat disebut "*the writer of history*" daripada "*the author of history*".

Oleh sebab demikian, berharap bahwa Hamka mewariskan suatu metodologi yang ajeg dalam bidang sejarah yang bisa dikembangkan dan diajarkan secara luas adalah suatu harapan yang berlebihan. Pasalnya mungkin

¹ Berkait dengan buku *Ayahku* ini, Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjomihardjo memberikan komentar:

"Hamka, ulama dan pengarang novel yang terkenal itu, juga pernah menulis sebuah tulisan pendek tentang sejarah Islam di Sumatera (1950) dan karyanya yang terpenting *Ayahku* (1963) yang tidak saja melukiskan biografi ayahnya, seorang Reformis Islam yang pertama di Sumatera, tetapi juga mengandung bahasan umum tentang Islam di Sumatera." (Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjomihardjo [ed.], *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Perspektif*, [Jakarta: Gramedia, 1985] hal. 34).

Tulisan yang dibuat oleh Taufik Abdullah ini merupakan ulasan terhadap karya-karya historiografi primer yang penting tentang Indonesia. Dalam hal ini Hamka disinggung, namun tidak semua karyanya diapresiasi. Hanya yang mengandung informasi penting dan mendasar untuk pengayaan informasi mengenai aspek-aspek kesejarahan di Indonesia yang disebut. Dalam hal ini hanya kedua karyanya itulah yang dianggap memberikan kontribusi bagi sejarah Indonesia, terutama mengenai sejarah pergerakan Islam di Indonesia.

bukan karena Hamka tidak memiliki kemampuan untuk itu, melainkan karena Hamka dalam hal penulisan sejarah sebetulnya lebih merupakan penulis populer yang belajar secara otodidak, bukan seorang penulis ahli yang terlatih khusus mengkaji dan mendalami disiplin ilmu sejarah.² Keahlian Hamka sendiri sesungguhnya ada pada bidang kajian *dirâsah islâmiyyah*. Keandalannya dalam bidang ini sudah tidak bisa terbantahkan dengan terbitnya berbagai bukunya tentang kajian-kajian Islam, terutama *Tafsir Al-Azhar*. Buku tafsir Al-Quran yang dituliskannya ini telah menunjukkan penguasaan Hamka yang mendalam atas berbagai disiplin ilmu-ilmu Islam; ditambah wawasannya yang luas dalam berbagai hal.

Walaupun demikian, kemampuan otodidak Hamka dalam menulis sejarah ini bukan tidak meninggalkan sama sekali bekas pemikiran yang penting untuk dikaji dan diperdalam oleh para peminat sejarah Islam pada masa-masa berikutnya. Dari sekian banyak tulisan Hamka yang layak untuk mendapat apresiasi adalah usahanya untuk mengokohkan teori kedatangan Islam ke Indonesia yang sudah terjadi sejak abad ke-7 M dari tanah Arab. Teori ini sesungguhnya bukan teori baru, karena Hamka pun hanya mengutip apa yang disampaikan Thomas W. Arnold dalam *The Preaching of Islam*.³ Kendati bukan sebagai penemu teori ini, makalah Hamka yang disampaikan di berbagai tempat tentang masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 dari tanah Arab ini telah sedikit menggeser teori yang lebih dulu populer, yaitu bahwa masuknya Islam ke Indonesia adalah abad ke-13 dari Gujarat India.

Teori ini dikemukakan Hamka untuk menolak anggapan bahwa Islam yang datang ke Indonesia adalah Islam yang sudah tidak murni atau Islam sinkretik

² Sebagai bahan perbandingan bagaimana tanggapan terhadap posisi Hamka dalam kaitannya dengan pendalaman ilmu di luar ilmu-ilmu agama, ada baiknya disimak kementar Abdurrahman Wahid Dalam pengantarnya untuk buku *Hamka di Mata Hati Umat* berikut.

“...ilmu pengetahuan yang dicernakannya secara keseluruhan berwatak sporadis, tidak disertai kelengkapan dan peralatan metodologis....Sudah bukan rahasia lagi, kilatan-kilatan pemikiran Buya Hamka lebih banyak berupa “pernyataan umum” saja tentang suatu persoalan, tanpa ada penguasaan penuh atas apa yang dipermasalahkan itu sendiri. Ini tampak nyata dalam bidang yang dibanggakannya, yaitu sejarah (lebih khusus lagi sejarah perkembangan Islam. Begitu banyak nama, tanggal, dan nama yang diingatnya di luar kepala, sehingga boleh dikata dapat dinamai “pengetahuan ensiklopedis”. Tetapi anehnya sekalipun belum pernah Buya Hamka menyinggung masalah historiografis yang berkaitan dengan rekonstruksi masa lampau Islam, sepanjang ingatan kita. (Nasir Tamara [ed.], *Hamka di Mata Hati Umat*, [Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996] hal. 28).

³ Berulang-ulang dalam bukunya *Sejarah Umat Islam*, Hamka menyebut nama T.W. Arnold sebagai rujukan pendapatnya bahwa Islam telah ada di Indo esia sejak abad ke-7. Arnold sendiri menurut Hamka mengutip pendapat W. P. Grunveld dalam publikasi penelitiannya, *Notes on the Malay Archipelago and Malacca, Compiled from Chinese Sources (Vert. Bataviasche Genootschap van K. En W. Deel/1880)*. Penjelasan Hamka ini menunjukkan bahwa Hamka sendiri tidak melakukan riset sama sekali mengenai masalah ini. Ia hanya meminjam teori yang dipopulerkan oleh Arnold itu. Lihat selengkapnya dalam Hamka, *Sejarah Umat Islam Pra-Kenabian sampai Islam di Nusantara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016) hal. 500-504.; juga dalam makalahnya “Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Pesisir Sumatera Utara” dalam *Risalah Seminar Sejarah Masuknja Islam ke Indonesia* (Jakarta: Panitia Seminar Sedjarah Masuknja Islam ke Indonesia, 1963) hal. 72-95

yang telah bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan Hindu di India. Hamka secara langsung mengkritik sumber pendapat ini yang berasal dari berbagai tulisan Snouck Horgronje yang salah satunya terekam dalam "L'Arabie at les Indes Neerlandaises"; *Revue de L'Historoire des Religions*, vol. iviii p. 69 sqq. Hamka menduga bahwa Horgrounje secara sengaja mengangkat teori India ini, dalam kapasitasnya sebagai penasihat pemerintah Belanda urusan pribumi di Indonesia, untuk melemahkan perlawanan kaum Muslim Indonesia terhadap Belanda. Sebab, menurut Hamka, Horgronje sangat tahu bahwa kuatnya perlawanan umat Islam terhadap kolonialisme adalah karena kuatnya pengaruh Arab di kawasan ini. Pengetahuan ini didapatkannya dari hasil risetnya tentang bangsa Aceh yang sangat sulit ditaklukkan. Ia melakukan riset ini bertahun-tahun hingga harus menyambangi Mekah untuk menyempurnakan kajiannya. Oleh sebab itu, Horgronje berusaha untuk melemahkan mental bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim itu dengan mengaitkan sejarah keislmanannya dengan tanah India, bukan Arab.⁴ Oleh sebab itu, Hamka sangat berkepentingan untuk mengingatkan lagi bahwa pengaruh Arab dalam pengetahuan keislaman bangsa Indonesia sangat kuat. Ia katakan:

"Percobaan mengatur secara ilmiah agar orang dapat menerima bahwa agama Islam di Indonesia bukanlah diterima langsung dari Tanah Arab atau dari orang Arab tampaknya seperti suatu percobaan yang amat teratur untuk menghilangkan keyakinan negeri-negeri Melayu tentang hubungan ruhani mereka dan Tanah Arab atau orang Arab sebagai sumber pertama dari Islam."⁵

Kelihatannya keseriusan Hamka untuk menolak teori India dengan mengangkat teori Arab ini benar-benar hanya lintasan pikiran reaktif belaka. Hal ini terlihat dari tidak adanya usaha-usaha Hamka untuk membuktikan lebih lanjut bahwa sejarah dan peradaban Indonesia memiliki pengaruh kuat dari Islam yang datang dari Arab dari berbagai analisis. Ia hanya menyebutkan beberapa sumber lokal dari kerajaan-kerajaan Islam yang sangat bangga mengaitkan diri secara langsung dengan Arab. Selain itu, ia juga menyebutkan fakta tentang beberapa raja Islam di Indonesia ini yang keturunan Arab. Oleh sebab itu, dalam banyak hal Hamka masih mudah menyebut pengaruh Hindu dan Budha (baca: India) di berbagai kawasan yang masih belum kuat simbol-simbol keislamannya.

Memperhatikan apa yang dituliskan Hamka mengenai sejarah Islam di Indonesia ini, belum jelas sekali apa usaha "Islamisasi" yang dilakukannya terhadap sejarah Indonesia. Bukan hanya tidak jelas dari segi konsep dan metodologi, Hamka pun terlihat tidak terlihat menunjukkan apa yang perlu "di-

⁴ Lihat Hamka, "Masuk dan Berkembangnya...." hal. 81; riset Snouck Horgronje tentang Aceh kemungkinan yang dimaksud adalah riset yang publikasinya berjudul *The Atjehers* (2 jilid) dan *The Gayos*. Kedua buku ini terbitan dalam bahasa Indonesianya sempat dipublikasikan oleh INIS Jakarta.

⁵ Hamka, *Sejarah Umat Islam....* hal. 504

Islam-kan” dari penulisan sejarah Indonesia. Ia hanya mengkritik pendekatan Horgronje di atas ditambah dengan kritik atas beberapa penulis Muslim lain tentang kemungkinan ajaran Syiah sebagai Muslim pertama yang datang ke Indonesia seperti pendapat Ali Hasjmi dan Abu Bakar Atjeh.⁶ Walaupun demikian, apa yang ditulis Hamka dalam berbagai esai sejarahnya sudah menunjukkan semangat perlawanan terhadap tulisan-tulisan yang sudah mapan tentang sejarah Indonesia yang dianggap merugikan dan merendahkan martabat umat Islam. Semangatnya memang sporadis seperti kesimpulan Abdurrahman Wahid, akan tetapi semangat ini patut dihargai sebagai pembuka jalan kepada generasi selanjutnya untuk bersikap kritis terhadap klaim-klaim sejarah Indonesia, terutama yang ditulis oleh orang yang tidak menyukai Islam.

Gagasan Ahmad Mansur Suryanegara

Tokoh berikutnya yang penting untuk disinggung dalam konteks Islamisasi penulisan sejarah adalah Ahmad Mansur Suryanegara. Semasa mahasiswa ia adalah aktivis mahasiswa Islam yang dekat dengan M. Natsir. Tidak mengherankan, bila ia banyak dipromosikan oleh kelompok Dewan Dakwah sebagai sejarawan Muslim. Majalah *Abadi* milik para aktivis Masyumi adalah media yang banyak mempublikasikan tulisan Mansur sejak akhir tahun 1960-an. Berikutnya majalah *Panji Masyarakat* milik Hamka. Ia dipromosikan sebagai sejarawan karena menyelesaikan sarjana dalam bidang sejarah di Universitas Padjadjaran Bandung, bahkan menjadi dosen di perguruan tinggi ini pada jurusan sejarah.

Pemikiran-pemikiran Mansur mengenai sejarah Indonesia dan sejarah Islam di Indonesia sudah sejak lama ia publikasikan. Bahkan sejak tahun 60-an saat Suharto baru memulai menancapkan kuku-kuku kekuasaannya di negeri ini. Hampir setiap tulisannya selalu bernada menggugat cerita-cerita yang sudah dianggap benar dan mapan mengenai sejarah Indonesia. Ia ingin mengubah cara pandang orang tentang sejarah Indonesia. Pada buku terbarunya *Api Sejarah* yang terbit dalam dua jilid tebal-tebal terang-terang dituliskan tujuannya itu: “Buku yang akan Mengubah Drastis Pandangan Anda tentang Sejarah Indonesia.”

Salah satu tulisan lamanya dimuat di harian milik keluarga besar Masyumi, *Abadi* tanggal 19 Mei 1969 berjudul, “Benarkah 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional.” Tulisan ini menggugat kebenaran klaim bahwa Budi Utomo adalah organisasi pertama yang mempelopori kesadaran dan kebangkitan nasional. Faktanya justru Kongres Boedi Oetomo di Surakarta tahun 1928 menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia. Padahal tahun-tahun itu gelora persatuan Indonesia sudah menggema begitu kuat. Salah satunya mewujudkan dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda.

Pemikiran-pemikirannya mengenai berbagai aspek dalam sejarah Indonesia terus konsisten dipertahankannya, bahkan sampai hari ini. Mulanya

⁶ Penolakan terhadap kemungkinan Syiah sebagai pembawa Islam pertama ke Indonesia juga dapat dilihat dalam makalah Hamka “Masuk dan berkembangnya...” hal. 82-85

pikiran-pikirannya mengenai berbagai aspek dalam sejarah Indonesia terlihat berserak dan muncul per tema. Sampai bukunya yang cukup menghebohkan, *Menemukan Sejarah*, terbit tahun 1995 memang belum terlihat rangkaian gagasan utuhnya mengenai sejarah Indonesia.

Walaupun begitu, ide-idenya dalam buku yang dikumpulkan dari berbagai tulisannya di koran-koran, majalah, jurnal, dan seminar-seminar sampai awal tahun 1990-an itu cukup banyak yang mengejutkan. Hampir tidak ada sejarawan yang berani melawan kemapanan sejarah versi Orde Baru saat itu. Bukunya tampil bak fatamorgana di padang pasir. Segera saja bukunya diburu oleh berbagai kalangan dari seluruh Indonesia, didiskusikan, dipelajari, dan diapresiasi.

Selain masalah Budi Oetomo di atas, ide-ide lainnya yang mengejutkan antara lain: Islam-lah yang menjadi pelopor kebangkitan nasional, para pahlawan yang melakukan pemberontakan terhadap Belanda adalah tokoh-tokoh Muslim seperti Sisingamangaraja XII, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan gerakan-gerakan dari pesantren-pesantren juga tarekat, Kartini banyak terinspirasi Al-Quran, dan sebagainya. Pendapatnya mengenai Sisingamangaraja XII cukup mengejutkan. Sebab, sebelumnya dalam buku-buku sejarah Sisingamangajara XII disebut-sebut sebagai penganut agama Pelbegu (agama asli orang Batak).

Walaupun banyak yang meragukan bahkan menantang ide-idenya, terutama dari sejarawan-sejarawan sekuler, Mansur tidak pernah surut memperjuangkan ide-idenya. Bahkan, sudah bukan sekali dua kali ada yang menyebutnya sebagai "sejarawan picisan". Terakhir, saat peluncuran perdana bukunya *Api Sejarah*, salah seorang sejarawan Indonesia yang namanya cukup populer menyebut bukunya tidak bermutu. Buku Mansur ini dinilai terlalu banyak menggunakan sumber-sumber sekunder. Menanggapi kritikan itu, Mansur hanya mempersilakan siapa saja membaca dulu bukunya.

Setelah dibaca, buku ini memang akhirnya mengantarkan para pembaca pada idenya yang utuh mengenai sejarah Indonesia dan sejarah Islam Indonesia yang selama ini dituliskannya berserak-serak di berbagai media. Kesimpulan dari buku setebal lebih dari 600 halaman ini adalah: sejarah Indonesia adalah sejarah perjuangan umat Islam yang berjuang mengatasnamakan Islam. Umat Islam dan Islamlah yang telah menanam saham paling besar atas berdirinya Indonesia. Namun, kenyataannya saat kemerdekaan diraih, saham yang ditanam itu ternyata keuntungannya tidak banyak dinikmati oleh umat Islam. Ini merupakan kesimpulan atas gagasan. Mengenai kualitas tulisannya akan dibicarakan kemudian.

Masih dalam pandangan Mansur, kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam penulisan sejarah Islam saat ini adalah karena sekularisasi yang begitu kuat melanda negeri ini. Promotornya awalnya adalah penjajah Belanda.. Pikiran-pikiran penjajah yang sekuler ini pula yang memenuhi ruang-ruang belajar para mahasiswa sejarah. Karena penjajah tidak pernah senang pada Islam yang sejak

awal menjadi perintang utama Belanda di Nusantara, segala usaha dibuat untuk menghilangkan jejak Islam dan umat Islam di negeri ini. Oleh sebab itu, sampai saat ini ia terus berjuang agar semakin banyak lahir sejarawan-sejarawan yang pikirannya tidak sekuler agar dapat memperlihatkan secara wajar dan benar bagaimana peran Islam di negeri ini.

Pandangan seperti ini sah-sah saja sebagai wacana yang ikut berkontestasi di ruang publik penulisan sejarah Indonesia. Pandangan ini sama sahnya seperti saat dalam Seminar Sejarah Indonesia I tahun 1957 mengemuka keinginan menuliskan sejarah Indonesia dari sudut pandang Indonesia-sentris, bukan lagi Belanda-sentris. Nasionalisme yang berhasil diwujudkan dalam wujud Proklamasi Kemerdekaan juga ikut merasuk dalam pikiran para sejarawan. Jelas ini tidak ada kaitan dengan fakta sejarah, melainkan masalah ideologi dan kepentingan. Kritik Mansur (dan sejarawan pendahulunya seperti Abdullah bin Nuh, Hamka, Ali Hasjmi, dan lainnya) terhadap kecenderungan ideologis inipun bukan sesuatu yang bisa dipersalahkan. Apalagi, dari sudut pandang kepentingan nasional dan keutuhan NKRI, kritik yang dilontarkan sama sekali tidak menggugat kewujudan NKRI di kepulauan ini. Mansur dan penulis pendahulunya hanya ingin mengatakan: letakkanlah sejarah negeri ini secara proporsional; jangan gara-gara nama yang diajukan adalah "Islam" yang sangat menentang penjajah dan pada umumnya ide-ide Barat yang menyimpang dari keyakinannya, lantas kenyataan peran umat Islam secara sengaja dihilangkan! Kalau ini dilakukan jelas sejarah Indonesia masih sangat Nederlando-sentris (baca; Barat-sentris) dan tidak jujur menuliskan fakta-fakta.

Walaupun secara semangat pemikiran untuk mengislamisasi penulisan sejarah Islam di Indonesia, Mansur sudah memberikan kontribusi penting, namun memang dalam hal metodologi, buku ini memperlihatkan kelemahan yang cukup fundamental di sana-sini. Untuk sejarawan sekelas Mansur yang sudah puluhan tahun malang-melintang di dunia "sejarah" seharusnya kesalahan-kesalahan ini tidak perlu terjadi. Sebab, pada umumnya kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan mendasar yang menunjukkan ketidakberhasilan Mansur mendapatkan sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh ada beberapa kasus yang sempat penulis catat yang mengandung kelemahan metodologis cukup fatal.

Pertama, penggunaan sumber sejarah yang tidak kritis dan tidak lengkap. Persoalan yang pasti akan dipertanyakan setiap sejarawan adalah sumber-sumber yang digunakan. Sebagai seorang sejarawan akademis, semestinya Mansur dapat menghindarkan diri menggunakan sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau menggunakan sumber yang belum lengkap untuk dijadikan kesimpulan final. Namun, kenyataannya salah satu kelemahan mendasar buku ini justru pada penggunaan sumber-sumber yang terlihat agak "serampangan".

Barangkali inilah yang membuat beberapa orang sejarawan menilai buku ini sebagai buku yang "tidak ilmiah". Bagi saya, perkara ilmiah atau tidak ilmiah

derajatnya bertingkat-tingkat. Ada yang derajat ilmiahnya sangat kuat, ada pula yang biasa-biasa saja. Buku ini kalau disebut “tidak ilmiah” sama sekali saya tidak setuju. Tetap ada nilai-nilai ilmiah yang diperlihatkan buku ini.

Memang patut disayangkan bahwa derajat ilmiah buku ini menjadi agak berkurang ketika Mansur kehilangan akses pada penelitian-penelitian mutakhir mengenai berbagai aspek dalam sejarah Indonesia. Penelitian-penelitian baru ini sudah begitu banyak, terutama yang ditulis dalam bentuk tesis dan disertasi. Sebagian besar memperlihatkan aspek-aspek baru yang unik yang belum ditemukan sebelumnya.

Narasi dan kesimpulan hasil-hasil penelitian baru ini sangat mungkin tidak disetujui oleh Mansur atau oleh penulis manapun. Namun, data-data baru yang ditemukan akan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Data-data yang diolah dari berbagai sumber merupakan satu-satunya akses masuk untuk memahami (*understanding*) masa lalu. Tanpa sumber-sumber itu, mustahil kita bisa mengetahui sejarah. Oleh sebab itu, data-data baru yang disajikan dalam berbagai tesis dan disertasi itu sangat penting untuk dijadikan bahan rujukan dan perbandingan.

Oleh sebab akses yang minim terhadap penelitian-penelitian mutakhir mengenai aspek-aspek sejarah Indonesia, buku-buku Mansur seperti *Api Sejarah* terasa tidak memberikan perspektif yang benar-benar baru sama sekali, terutama bagi mereka yang menekuni sejarah Indonesia secara akademik. Bagi masyarakat awam, barangkali banyak informasi yang terasa “baru”, karena memang pada umumnya sejarah termasuk bidang yang asing dan jarang dibaca oleh masyarakat umum. Buku-buku sejarah di pasaran termasuk buku-buku yang sulit terjual, kecuali beberapa buku yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Oleh sebab itu, sangat bisa dimengerti apabila masyarakat awam menangkap apa yang diceritakan Mansur ini termasuk baru.

Salah satu contohnya adalah pembahasan dalam buku *Api Sejarah* mengenai sejarah Persatuan Islam (Persis) yang disinggung cukup panjang pada jilid pertama. Saya secara pribadi telah melakukan penelitian secara khusus mengenai beberapa aspek dalam sejarah Persis ini saat menulis tugas akhir S1 di Unpad dan S2 di UI. Beberapa sumber primer berhasil saya temukan. Ada beberapa cerita baru yang menarik dan tidak terungkap dalam buku-buku lama. Namun amat disayangkan bahwa Mansur hanya menulis mengenai Persis ini menggunakan buku lama Deliar Noer dan buku Dadan Wildan yang kurang mendalam. Sisanya, Mansur mengandalkan pengetahuannya sepanjang berinteraksi dengan komunitas Persis di Bandung.

Alhasil, akibat kekurangan sumber inilah banyak cerita yang ditampilkan secara tidak berimbang. Bahkan informasi ‘kabar burung’ mengenai debat A. Hassan dengan Ajengan Sukamiskin pun dijadikan sebagai bahan dalam buku ini. Sekalipun di akhir Mansur menulis bahwa bagian ini masih harus dilakukan penelitian lebih mendalam, sebagai sejarawan yang baik, Mansur semertinya tidak

perlu memasukkan bagian ini dalam rangkaian cerita. Kalau cerita ini dibaca oleh orang yang mengerti sejarah dengan baik, mungkin tidak akan terlalu menjadi masalah. Celakanya, buku banyak sekali dibaca orang awam sehingga bisa saja orang menyimpulkan secara pasti apa yang diceritakan oleh Mansur dalam buku ini.

Contoh seperti ini bukan hanya satu. Contoh lain adalah mengenai keterlibatan M. Natsir dalam PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yang selalu menghambat diusulkannya Natsir sebagai pahlawan nasional. Mansur tidak memberikan alasan yang memadai sehingga dapat menjelaskan posisi Natsir di PRRI dan posisi PRRI sendiri (Jil. II hal. 377-381). Mestinya, sebagai pengagum Natsir, Mansur harus menelusuri betul mengapa sampai Natsir mau bergabung dengan PRRI. Surat Masyumi kepada Sukarno yang menjelaskan bahwa Natsir bergabung atas inisiatif pribadi sama sekali tidak menolong posisi Natsir. Apalagi dengan sangat meyakinkan Mansur menjuduli sub. karangannya dengan kata-kata "Pemberontakan PRRI-Permesta."

Seandainya Mansur mengakses penelitian mutakhir mengenai PRRI-Permesta, misalnya yang ditulis Prof. R.Z. Leirizza⁷, keruwetan menempatkan Natsir dalam PRRI sedikit banyak akan terjawab. Mansur tidak akan bingung ketika di satu sisi menyanjung Pak Natsir sebagai pejuang NKRI dengan Mosi Integral yang digagasnya (Jil. II hal. 315-321), sementara di sisi lain secara tidak langsung memasukkannya sebagai pemberontak NKRI karena ikut terlibat dalam PRRI. Kalaupun tidak menggunakan buku Prof. R.Z. Leirizza, mestinya Mansur mencermati bagaimana proses M. Natsir sampai berhasil disetujui sebagai "Pahlawan Nasional" tahun 2009 lalu. Di sana, banyak tulisan yang akhirnya menempatkan Natsir benar-benar sebagai orang yang tidak pernah menjadi pengkhianat NKRI, sekalipun terlibat dalam PRRI. Lebih dari itu, bila Mansur cermat mengikuti tulisan mengenai PRRI, pandangannya tentang PRRI tidak sampai harus menempatkannya sebagai "pemberontak". Sebab, PRRI sesungguhnya lahir hanya sebagai bentuk protes ketidaksetujuan mereka terhadap PKI.

Contoh lain tentang ke-Islam-an Sisingamangaja XII. Mansur begitu yakin bahwa Sisingamangaraja XII adalah seorang Muslim yang baik dan sudah menjalankan ajaran-ajaran Islam secara konsisten. Sangat disayangkan bahwa buku ini tidak mengulas berbagai literatur yang kontra terhadap argumen ini. Argumen ke-Islam-an Sisingamangaraja ini dipopulerkan oleh penulis biografi Sisingamangaraja XII, Muhammad Said. Dengan beberapa bukti, ia mengajukan teori ini. Namun, dengan bukti yang lain Prof. Sidjabat dalam *Ahu Sisingamangaraja* membantah klaim ini. Argumen Sidjabat cukup meyakinkan, sekalipun banyak klaimnya yang berlebihan. Seandainya buku Sidjabat ini

⁷ R.Z. Leirizza, *PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, Pustaka Grafiti Jakarta 1991. Menjelang penetapan M. Natsir sebagai pahlawan nasional, *Majalah Tempo* Edisi 21/XXXVII/14 - 20 Juli 2008 menurunkan laporan khusus mengenai sosok M. Natsir dari berbagai sudut. R.Z. Leirizza menulis artikel khusus mengenai keterlibatannya dengan PRRI.

dijadikan bandingan, teori yang diklaim Mansur dalam buku ini akan lebih bernas dan berisi. Apapun akhirnya kesimpulan yang diambil Mansur.

Pun ketika buku ini mengisahkan tentang berdirinya Kerajaan Saudi Arabia (KSA) yang dianggap membangkang terhadap kekuasaan Dinasti Utsmani (Ottoman) dan berkolaborasi dengan penjajah. Sayang sekali Mansur tidak membaca bantahan-bantahan yang dituliskan berbagai penulis yang tidak setuju atas klaim seperti ini. Tentu bantahan itu disusun berdasar atas argumentasi dan fakta-fakta historis yang layak diapresiasi. Seandainya argumen bantahan ini dapat disajikan dalam buku ini dan diapresiasi secara proporsional, kesimpulan apapun yang akhirnya diambil Mansur akan semakin mengokohkan kualitas buku ini.

Kelemahan metodologis lain yang terdapat dalam bukunya, terutama *Api Sejarah* adalah masalah sistematika penyajian yang meloncat-loncat. Masalah ini sebetulnya masalah teknis belaka, namun cukup mengganggu eksplanasi. Sejak jilid pertama, Mansur agak meloncat-loncat dalam menjelaskan satu periode ke periode berikutnya. Penyajian seperti ini memperlihatkan bahwa buku ini “tidak solid” sebagai sebuah buku yang fokus menyajikan satu masalah tertentu. Akhirnya, buku ini lebih mirip dengan kumpulan karangan seperti pada buku Mansur terdahulu *Menemukan Sejarah*.⁸Saya menduga bahwa buku ini sesungguhnya hanya kompilasi dari berbagai tulisan yang pernah dibuat untuk berbagai surat kabar dan majalah. Kelemahan kompilasi semacam ini memang akhirnya tidak padu dan tidak fokus karena masing-masing tulisan berdiri sendiri. Menemukan benang merah dalam tulisan berserak memang agak sulit.

Contohnya ketika menceritakan Persis pada jilid pertama. Judul bab yang membawahi tulisan ini adalah “Peran Ulama dalam Gerakan Kebangkitan Kesadaran Nasional (1900-1942)”. Salah satu yang menjadi pokok bahasan adalah Persis. Namun, sayang Mansur tidak tahan untuk hanya membatasi diri pada tahun yang ditulisnya sendiri. Setelah menceritakan berdirinya Persis dan kiprahnya sebelum Kemerdekaan, Mansur tidak tahan untuk menceritakan Persis di bawah kepemimpinan Isa Anshary (1948-1960), E. Abdurrahman (1962-1984), dan A. Latif Muchtar (1984-1997). Judul bab besar yang dibuatnya di awal benar-benar diabaikan. Kasus yang sama juga terjadi saat menceritakan Pondok Modern Gontor yang diceritakannya sampai saat masa presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, dan SBY.

Hampir dalam setiap bab, inkonsistensi judul dan isi terus terjadi. Kalaupun Mansur membiarkan buku ini dibuat sistematikanya *zig-zag*, seharusnya editor menyarankan kepada Mansur untuk memberikan penjelasan mengapa sistematikanya dibuat demikian. Dengan memberikan penjelasan khusus, misalnya pada bab Pendahuluan, pembaca tidak akan dibingungkan dengan buku ini. Paling tidak, pembaca akan memposisikan buku ini

⁸ Ahmad Masur Suryanegara, *Menemukan Sejarah*, Mizan Bandung, 1995.

sebagaimana adanya. Dengan begitu, ekspektasi pembaca pun tidak akan terlalu berlebihan terhadap buku ini.

Setelah menelaah apa yang telah dilakukan Ahmad Mansur Suryanegara dalam berbagai bukunya, dapat disimpulkan bahwa yang dilakukannya dalam usaha-usaha melakukan Islamisasi penulisan sejarah mirip dengan yang dilakukan oleh Hamka. Baik Hamka maupun Mansur lebih berfokus pada kebutuhan awam mengenai berbagai informasi kesejarahan “tanding” dari yang sudah ada dan diajarkan oleh pemerintah di sekolah-sekolah. Hamka dan Mansur sangat bersemangat ingin menunjukkan berbagai cerita yang akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Islam adalah yang paling berpengaruh di kawasan ini, bukan Hindu, apalagi Kristen. Hanya saja, patut disayangkan bahwa keduanya kadang mengabaikan aspek kedalaman klaim-klaim historis yang dibuatnya sehingga kurang mendapatkan apresiasi dari kalangan akademisi pengkaji sejarah.

PENUTUP

Bila memperhatikan apa yang dilakukan oleh Hamka dan Ahmad Mansur Suryanegara, gagasan Islamisasi penulisan sejarah di tangan kedua penulis ini belum memperlihatkan metodologi yang ajeg dan bisa diaplikasikan pada penulisan sejarah ilmiah dan akademik secara lebih luas. Boleh dikatakan pendekatan yang dilakukan oleh keduanya masih bersifat embrional, yaitu baru pada tahap munculnya kesadaran “ada yang salah dalam penulisan sejarah Indonesia”. Keduanya sama-sama berkesimpulan kesalahannya adalah pada sudut pandang kolonial dan kecenderungan sekuler dalam penulisan sejarah sehingga mengubur peran Islam yang sangat penting dalam sejarah Indonesia.

Kesadaran ideologis semacam ini banyak diikuti oleh penulis-penulis populer berikutnya dalam jumlah yang cukup banyak, walaupun dengan tema yang umumnya tidak banyak berubah. Sebab, bagi kalangan penulis non-sejarawan, perhatian mereka buka pada menggali dan merekonstruksi “cerita baru”, melainkan pada *ideological war* yang memanfaatkan cerita-cerita sejarah. Ini tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi studi sejarah, terutama sejarah Islam, karena tidak ada hal baru yang dibutuhkan dalam pengembangan ilmu-ilmu sejarah.

Implementasi kendasaran ideologis dalam penulisan sejarah biasanya diwujudkan dengan melakukan pemihakan terhadap apa saja yang berbau Islam. Tokoh-tokoh Islam, bagaimanapun keadaannya, selalu akan diletakkan sebagai tokoh protagonis dalam lakon sejarah Indonesia. Pada saat yang sama, siapa saja yang kafir, adalah tokoh antagonis yang citranya harus buruk. Pendekatan ini akan sangat mudah menyeret para penulisnya pada simplifikasi penulisan sejarah. Data-data sejarah dipaksa untuk mengikuti keinginannya, tanpa pendalaman dan pemahaman yang mendalam pada setiap kasus yang dituliskan. Model semacam ini jelas tidak akan banyak gunanya untuk memberikan pemahaman wajar dan manusiawi pada sejarah. Jangan harap juga kita bisa

menemukan gerak laju (*continuity*) dan perubahan (*change*) dalam tulisan sejarah semacam ini.

Kelemahan lain dari pendekatan sejarah ini adalah mudahnya melakukan glorifikasi terhadap tokoh atau institusi tertentu, tanpa memperhatikan kewajarannya dari sudut pandang manusiawi dan kadang tanpa memperhatikan nilai-nilai apa yang hendak disampaikan kepada para pembaca dari peristiwa sejarah tertentu. Sebab, hal paling diperhatikan dari penulisan sejarah semacam ini adalah ingin menunjukkan bahwa tokoh protagonis yang didukungnya adalah orang hebat sehabat-hebatnya dalam sejarah. Tentu saja sebaliknya dari itu, tokoh antagonisnya harus menjadi orang yang buruk seburuk-buruknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Masur Suryanegara, *Menemukan Sejarah*, Mizan Bandung, 1995.
- Hamka, "Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Pesisir Sumatera Utara" dalam *Risalah Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia* (Jakarta: Panitia Seminar Sedjarah Masuknya Islam ke Indonesia, 1963), h. 72-95.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam Pra-Kenabian sampai Islam di Nusantara*. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII14 - 20 Juli 2008
- Nasir Tamara (ed.), *Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- R.Z. Leirizza, *PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Grafiti, 1991.
- Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjomihardjo (ed.), *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia, 1985
- W.P. Groeneveld, *Notes on the Malay Archipelago and Malacca, Compiled from Chinese Sources* (Vert. Bataviasche Genootschap van K. En W. Deel/1880).